

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MALANG TENGGARA  
TAHUN 2016-2036**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa Tengah, Jawa-Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  26. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  31. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  32. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
  33. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  34. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  35. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  36. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  37. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

38. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019), dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

72. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Pengediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
82. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
83. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
84. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

85. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
86. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
87. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
88. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
89. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
90. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
91. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
92. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
93. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik;
94. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional;
95. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
96. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
97. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
98. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
99. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 / PRT / 1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
101. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
102. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
103. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
104. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 / PRT / M / 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

105. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 / PRT / M / 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
106. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
107. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
108. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 / PERMEN / M / 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
109. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
110. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
111. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
112. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan;
113. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
114. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
115. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
116. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2007 tentang Pedoman pelaksanaan Survei Data Titik Referensi Jalan;
117. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
118. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
119. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
120. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
121. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
122. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
123. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
124. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

125. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
126. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
127. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
128. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
129. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26 / PRT / M / 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
130. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
131. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
132. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
133. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
134. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota beserta Rencana Rincinya;
135. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan / Kawasan Perkotaan;
136. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
137. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
138. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
139. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
140. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;
141. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
142. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;
143. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

144. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07 / PRT / M / 2009, Nomor : 19 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2009, Nomor: 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
145. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41 / Permentan / OT.140 / 9 / 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
146. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 42 / Menhut-II / 2009 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Pengelolaan Daerah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
147. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 46/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal;
148. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
149. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 49 / UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
150. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
151. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011;
152. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01 / PER / M.KOMINFO / 01 / 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
153. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
154. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
155. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
156. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Perusahaan Jalan Tol;
157. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 / PRT / M / 2010 tentang Standar Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
158. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
159. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 / PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
160. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
161. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

162. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
163. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
164. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 35/M-Ind/Per/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
165. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030;
166. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/ Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
167. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
168. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;
169. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
170. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
171. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
172. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
173. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten / Kota;
174. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
175. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
176. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan;
177. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
178. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
179. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;

180. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
181. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
182. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 71/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
183. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
184. Peraturan Menteri Perhubungan No PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
185. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
186. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
187. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
188. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
189. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD;
190. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
191. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
192. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
193. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
194. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
195. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
196. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
197. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
198. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
199. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan;

200. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
201. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
202. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
203. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
204. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
205. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
206. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
207. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
208. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.
209. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
210. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
211. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
212. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum;
213. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
214. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 98 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
215. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
216. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
217. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

218. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
219. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.
220. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
221. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai
222. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Bangunan Pengairan;
223. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
224. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
225. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
226. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
227. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
228. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
229. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
230. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalulintas Dan Angkutan Jalan;
231. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor : 09 / KPTS / M / IX / 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
232. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah;
233. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalulintas dan Angkutan Jalan;
234. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

235. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
236. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
237. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
238. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
239. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
240. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031;
241. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
242. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);
243. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032;
244. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
245. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota;
246. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
247. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur (Lembaran Daerah Nomor 16 Seri E);
248. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
249. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

250. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 10);
251. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 32);
252. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);
253. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Lokasi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 43);
254. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);
255. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
256. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
257. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
258. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);
259. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
260. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1); dan
261. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan  
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MALANG TENGGARA  
TAHUN 2016-2036

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Jawa Timur, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan

strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
16. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, zona, sub zona, blok, persil sebagaimana ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
17. Peruntukan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, zona, sub zona, blok, dan/atau persil.
18. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
20. Kelurahan adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab kepada camat.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari daerah dan/atau kawasan strategis daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW.
23. Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona perlindungan setempat adalah bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.

30. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
31. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai dan/atau saluran, termasuk sungai buatan dan/atau kanal dan/atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32. Mata air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
33. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
34. Sub zona sempadan sungai adalah bagian dari zona perlindungan setempat dengan fungsi perlindungan terhadap sungai.
35. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang dan/atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Zona RTH adalah bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai penghijauan dan resapan, berupa area memanjang dan/atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Sub zona RTH taman dan hutan kota adalah bagian dari zona RTH dengan bentuk taman lingkungan, taman kota, dan/atau hutan kota.
38. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota, yang ditetapkan sebagai taman kota oleh pejabat yang berwenang.
39. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
40. Sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan adalah bagian dari zona RTH dengan bentuk jalur hijaupejalan kaki, dan ruang di bawah jalan layang, taman median jalan, dan pulau jalan.
41. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan atau di dalam ruang pengawasan jalan atau berupa sabuk hijau yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.
42. Median jalan adalah suatu bagian tengah badan jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Median jalan dapat berbentuk median yang ditinggikan, median yang diturunkan, atau median rata.
43. Pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan.
44. Sub zona RTH makam dan fungsi tertentu adalah bagian dari zona RTH dengan fungsi pemakaman dan/atau bentuk sempadan jalur kereta api, jalur hijau saluran udara tegangan tinggi, sempadan sungai, pengamanan sumber air baku dan/atau kawasan sekitar mata air.

45. Zona suaka alam dan cagar budaya adalah bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
46. Sub zona cagar budaya adalah bagian dari zona suaka alam dan cagar budaya dengan bentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
47. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
48. Zona rawan bencana adalah bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, banjir, dampak letusan gunung berapi, gempa bumi, dan kebakaran.
49. Sub zona rawan bencana longsor adalah bagian dari zona rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami longsor.
50. Sub zona rawan bencana kebakaran adalah bagian dari zona rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana kebakaran.
51. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
52. Zona perumahan adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan hunian berupa kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
53. Sub zona rumah kepadatan tinggi adalah bagian dari zona perumahan, untuk tempat tinggal atau hunian dengan kepadatan bangunan di atas 100 (seratus) sampai 1000 (seribu) rumah per hektar.
54. Sub zona rumah kepadatan sedang adalah bagian dari zona perumahan, untuk tempat tinggal atau hunian dengan kepadatan bangunan di atas 40 (empat puluh) sampai 100 (seratus) rumah per hektar.
55. Sub zona rumah kepadatan rendah adalah bagian dari zona perumahan, untuk tempat tinggal atau hunian dengan kepadatan bangunan di bawah 10 (sepuluh) sampai 40 (empat puluh) rumah per hektar.
56. Zona perdagangan dan jasa adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
57. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal adalah bagian dari zona perdagangan dan jasa yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
58. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret adalah bagian dari zona perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal dan/atau regional yang dikembangkan dalam bentuk deret, dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

59. Zona perkantoran adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
60. Sub zona perkantoran pemerintah adalah bagian dari zona perkantoran, yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
61. Zona industri adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
62. Sub zona aneka industri adalah bagian zona industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen, yang dibedakan menjadi aneka pengolahan pangan, aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi, dan aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan.
63. Zona sarana pelayanan umum adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
64. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
65. Sub zona sarana pelayanan umum transportasi adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana transportasi darat yang berfungsi sebagai simpul bagi pergantian antarmoda dan intermoda, dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
66. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana kesehatan, dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
57. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana olah raga, dalam bentuk terbuka maupun tertutup.
68. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana sosial budaya, dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
69. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana peribadatan.
70. Zona peruntukan khusus adalah bagian dari kawasan budidaya yang mempunyai fungsi pengembangan kegiatan khusus pertahanan keamanan (hankam), tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), tandon, gardu induk, depo bahan bakar minyak dan gas dan lain-lain yang memerlukan penanganan dan perencanaan khusus dan/atau tertentu, serta dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
71. Sub zona tandon/reservoir adalah bagian dari zona peruntukan khusus, berupa bangunan cadangan air dengan fungsi untuk menampung dan menyimpan air agar dapat memenuhi dan/atau mencukupi kebutuhan air bersih.

72. Sub zona depo BBM/Gas adalah bagian dari zona peruntukan khusus, berupa bangunan dengan fungsi sebagai terminal bahan bakar minyak dan/atau gas yang melayani distribusi BBM ke SPBU dan pelanggan.
73. Sub zona gardu induk adalah bagian dari zona peruntukan khusus, berupa bangunan yang merupakan sub sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik.
74. Sub zona rumah pemotongan hewan adalah bagian dari zona peruntukan khusus, berupa bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
75. Zona campuran adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan beberapa kegiatan dan/atau peruntukan fungsi yang bersifat terpadu, seperti : (1). perumahan dan perdagangan dan jasa, (2). perumahan dan perkantoran, serta (3). perkantoran dan perdagangan dan jasa, (4). perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran.
76. Sub zona campuran perdagangan dan jasa, dan perkantoran adalah bagian dari zona campuran yang difungsikan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran, secara terpadu, yang dikembangkan secara vertikal, horisontal, atau vertikal dan horisontal.
77. Sub zona campuran perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran adalah bagian dari zona campuran yang difungsikan untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran, secara terpadu, yang dikembangkan secara vertikal, horisontal, atau vertikal dan horisontal.
78. Zona ruang manfaat jalan dan badan air adalah ruang yang dikembangkan untuk fungsi prasarana transportasi darat kecuali jalur kereta api dan alur dan/atau wadah air alami dan/atau buatan.
79. Sub zona ruang manfaat jalan adalah bagian dari zona ruang manfaat jalan dan badan air dengan fungsi sebagai badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
80. Sub zona ruang manfaat jalur kereta api adalah bagian dari zona ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api, dan badan air yang terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.
81. Sub zona badan air adalah bagian dari zona ruang manfaat jalan dan badan air dengan fungsi sebagai tempat kumpulan air yang terbentuk secara alami maupun buatan.
82. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan dan/atau lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan dan/atau lingkungan. rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan dan/atau lingkungan.

83. Izin pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan dan/atau perorangan untuk suatu rencana pemanfaatan ruang dengan memperhatikan RTRW, RDTR dan PZ, serta Rencana Kawasan Strategis, dan/atau RTBL.
84. Saluran udara tegangan tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan diatas 35 kiloVolt sampai dengan 230 kiloVolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah mencakup 12 (dua belas) kelurahan, seluas kurang lebih 3.077,36 (tiga ribu tujuh puluh tujuh koma tiga enam) hektar meliputi:
  - a. Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun;
  - b. Sebagian Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun;
  - c. Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun;
  - d. Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun;
  - e. Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun;
  - f. Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang;
  - g. Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang;
  - h. Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang;
  - i. Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang;
  - j. Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang;
  - k. Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang; dan
  - l. Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang.
- (2) Ruang lingkup materi Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. azas, visi dan misi;
  - b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan BWP;
  - c. kedudukan dan fungsi RDTR dan PZ dalam penataan BWP;
  - d. konsep pengembangan BWP;
  - e. rencana pola ruang;
  - f. rencana jaringan prasarana;
  - g. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
  - h. arahan pemanfaatan ruang;
  - i. arahan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - j. ketentuan perizinan;
  - k. insentif dan disinsentif;
  - l. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
  - m. kelembagaan;
  - n. arahan sanksi administratif;
  - o. ketentuan penyidikan;
  - p. ketentuan pidana;
  - q. ketentuan lain-lain;
  - r. ketentuan peralihan; dan
  - s. ketentuan penutup.
- (3) Penataan BWP Malang Tenggara meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## BAB III AZAS, VISI DAN MISI

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 3

- (1) Penataan BWP Malang Tenggara diselenggarakan berdasarkan asas penataan ruang.
- (2) Asas penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keterpaduan;
  - b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
  - c. keberlanjutan;
  - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
  - e. keterbukaan;
  - f. kebersamaan dan kemitraan;
  - g. perlindungan kepentingan umum;
  - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
  - i. akuntabilitas.

### Bagian Kedua Visi

#### Pasal 4

Visi Penataan BWP Malang Tenggara adalah terwujudnya BWP Malang Tenggara sebagai pusat kegiatan lokal dengan pelayanan kegiatan pemerintahan dan pusat kegiatan regional dengan pelayanan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri, yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan yang berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Misi

#### Pasal 5

Misi Penataan BWP Malang Tenggara adalah:

- a. mewujudkan pengembangan kompleks perkantoran pemerintah terpadu; .
- b. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri;
- c. mewujudkan pengembangan pusat perdagangan regional; dan
- d. mewujudkan permukiman perkotaan yang bersih, nyaman, aman dan memenuhi kaidah penataan hunian yang layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang.

BAB IV  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN BWP

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 6

Tujuan penataan ruang BWP Malang Tenggara adalah mewujudkan BWP Malang Tenggara sebagai pusat kegiatan lokal dengan pelayanan kegiatan pemerintahan dan pusat kegiatan regional dengan pelayanan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri, yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan BWP

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Malang Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ditetapkan kebijakan dan strategi rencana detail tata ruang.
- (2) Kebijakan rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan dan penataan zona perumahan;
  - b. pengembangan, penataan, dan pengendalian zona perdagangan dan jasa;
  - c. pengembangan, penataan dan pengendalian zona kawasan industri; dan
  - d. pengembangan dan penataan kompleks zona perkantoran pemerintah.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan BWP

Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan dan penataan zona perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan jalan penghubung antar kelompok - kelompok perumahan yang ada;
  - b. menyediakan aksesibilitas yang memadai antar perumahan;
  - c. meningkatkan kualitas lingkungan perumahan seperti air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan;
  - d. menyediakan taman dan area bermain pada zona perumahan.
  - e. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan 10% dari luas kavling;
  - f. mengembangkan taman skala lingkungan serta mengembangkan hutan kota skala kota; dan
  - g. mengembangkan RTH fungsi tertentu meliputi RTH sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan jalur kereta api dan makam untuk setiap zona perumahan.

- (2) Strategi pengembangan, penataan dan pengendalian zona perdagangan dan jasa meliputi:
  - a. mengembangkan perdagangan dan jasa baru di sepanjang jalan utama BWP Malang Tenggara;
  - b. menyediakan lahan parkir secara mandiri; dan
  - c. menyediakan jalur pejalan kaki/pedestrian yang menghubungkan antar zona perdagangan dan jasa.
- (3) Strategi pengembangan, penataan dan pengendalian zona industri meliputi:
  - a. mengendalikan dan membatasi pengembangan industri yang ada terutama pada jalur-jalur utama dan tidak berada di dalam kawasan industri;
  - b. meningkatkan akses antar zona industri menuju jalan utama BWP Malang Tenggara;
  - c. memisahkan zona industri dengan zona lainnya melalui penyediaan ruang terbuka hijau;
  - d. setiap industri dilengkapi dengan sarana pengolahan air limbah (IPAL) dan peralatan pengendali pencemaran lainnya;
  - e. menyediakan perumahan bagi pekerja;
  - f. mengembangkan jalur hijau sepanjang jaringan jalan terutama pada jalur pejalan kaki dan sekitar zona industri;
  - g. meningkatkan ruas jalan eksternal serta ruas jalan di dalam BWP Malang Tenggara; dan
  - h. meningkatkan kapasitas dan fungsi jalan utama di BWP Malang Tenggara sebagai antisipasi pintu keluar jalan tol yang berada di BWP Malang Timur menuju ke arah selatan;
- (4) Strategi pengembangan dan penataan kompleks zona perkantoran pemerintah meliputi :
  - a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung transportasi seperti angkutan umum yang melintasi BWP Malang Tenggara; dan
  - b. meningkatkan fungsi dan intensitas bangunan secara representatif dan ramah lingkungan sebagai pendukung kegiatan pelayanan pemerintah.

## BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI RDTR DAN PZ DALAM PENATAAN BWP

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 9

Instrumen Penataan BWP Malang Tenggara adalah RDTR dan PZ BWP Malang Tenggara

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 10

RDTR dan PZ dalam penataan BWP Malang Tenggara berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang;
- b. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. acuan dalam penyusunan RTBL.

BAB VI

Konsep Pengembangan BWP  
Bagian Kesatu  
Skenario Pengembangan

Pasal 11

Skenario pengembangan BWP Malang Tenggara meliputi:

- a. pengembangan pusat kegiatan baru;
- b. peningkatan kualitas dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengembangan kawasan industri;
- d. pengembangan jaringan jalan menuju kawasan industri; dan
- e. peningkatan fungsi dan kapasitas jalan Mayjen Sungkono.

Bagian Kedua  
Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 12

- (1) BWP Malang Tenggara dibagi menjadi 4 (empat) Sub BWP dan 22 (dua puluh dua) blok.
- (2) Sub BWP I dengan luas kurang lebih 724,01 (tujuh ratus dua puluh empat koma nol satu) hektar meliputi Kelurahan Sukun, Sebagian Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Ciptomulyo, sebagian Kelurahan Mergosono, terdiri dari 8 (delapan) Blok, yaitu:
  - a. Blok I-A dengan luas 82,72 (delapan puluh dua koma tujuh dua) hektar;
  - b. Blok I-B dengan luas 50,43 (lima puluh koma empat tiga) hektar;
  - c. Blok I-C dengan luas 120,77 (seratus dua puluh koma tujuh tujuh) hektar;
  - d. Blok I-D dengan luas 102,50 (seratus dua koma lima) hektar;
  - e. Blok I-E dengan luas 60,76 (enam puluh koma tujuh enam) hektar;
  - f. Blok I-F dengan luas 132,25 (seratus tiga puluh dua koma dua lima) hektar;
  - g. Blok I-G dengan luas 97,38 (sembilan puluh tujuh koma tiga delapan) hektar;
  - h. Blok I-H dengan luas 77,19 (tujuh puluh tujuh koma satu sembilan) hektar; dan

- (3) Sub BWP II dengan luas kurang lebih 1.063,55 (seribu enam puluh tiga koma lima lima) hektar meliputi Kelurahan Kotalama, sebagian Kelurahan Mergosono, sebagian Kelurahan Buring, sebagian Kelurahan Bumiayu, sebagian Kelurahan Wonokoyo dan sebagian Kelurahan Tlogowaru, terdiri dari 7 (tujuh) Blok, yaitu:
- a. Blok II-A dengan luas 94,45 (sembilan puluh empat koma empat lima) hektar;
  - b. Blok II-B dengan luas 88,85 (delapan puluh delapan koma delapan lima) hektar;
  - c. Blok II-C dengan luas 189,36 (seratus delapan puluh sembilan koma tiga enam) hektar;
  - d. Blok II-D dengan luas 120,53 (seratus dua puluh koma lima tiga) hektar;
  - e. Blok II-E dengan luas 133,58 (seratus tiga puluh tiga koma lima delapan) hektar;
  - f. Blok II-F dengan luas 298,56 (dua ratus sembilan puluh delapan koma lima enam) hektar; dan
  - g. Blok II-G dengan luas 138,23 (seratus tiga puluh delapan koma dua tiga) hektar.
- (4) Sub BWP III dengan luas kurang lebih 624,26 (enam ratus dua puluh empat koma dua enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Bumiayu, sebagian Kelurahan Tlogowaru dan Kelurahan Arjowinangun, terdiri dari 4 (empat) Blok, yaitu:
- a. Blok III-A dengan luas 168,99 (seratus enam puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar;
  - b. Blok III-B dengan luas 158,66 (seratus lima puluh delapan koma enam enam) hektar;
  - c. Blok III-C dengan luas 181,54 (seratus delapan puluh satu koma lima empat) hektar; dan
  - d. Blok III-D dengan luas 115,08 (seratus lima belas koma nol delapan) hektar.
- (5) Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 665,51 (enam ratus enam puluh lima koma lima satu) hektar meliputi sebagian Kelurahan Buring, sebagian Kelurahan Wonokoyo dan sebagian Kelurahan Tlogowaru, terdiri dari 3 (tiga) Blok, yaitu:
- a. Blok IV-A dengan luas 156,16 (seratus lima puluh enam koma satu enam) hektar;
  - b. Blok IV-B dengan luas 198,49 (seratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) hektar; dan
  - c. Blok IV-C dengan luas 310,86 (tiga ratus sepuluh koma delapan enam) hektar.
- (6) Peta pembagian sub BWP dan Blok tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 13

- (1) Sistem pusat pelayanan pada BWP Malang Tenggara terdiri dari pusat BWP, pusat Sub BWP, dan pusat Blok.
- (2) Pusat BWP Malang Tenggara berada pada ruang kegiatan Terminal Hamid Rusdi di Jalan Mayjen Sungkono dengan fungsi primer sebagai sarana pelayanan umum transportasi.
- (3) Pusat Sub BWP Malang Tenggara terdiri dari:
  - a. pusat Sub BWP I berada pada ruang kegiatan perdagangan Pasar Gadang Lama di Jalan Kolonel Sugiono dengan fungsi perdagangan dan jasa bentuk tunggal;
  - b. pusat Sub BWP II berada pada ruang kegiatan GOR Ken Arok di Mayjen Sungkono dengan fungsi sarana pelayanan umum olahraga;
  - c. pusat Sub BWP III pada perempatan yang menuju Bululawang dan Tajinan di Jalan Mayjen Sungkono dengan fungsi perkantoran dan perdagangan dan jasa bentuk deret; dan
  - d. pusat Sub BWP IV berada pada ruang kegiatan sekitar industri di Jalan Raya Tlogowaru dengan fungsi industri.
- (4) Pusat Blok pada BWP Malang Tenggara terdiri dari:
  - a. pusat Blok I-A berada pada ruang kegiatan kesehatan Rumah Sakit Soepraoen, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum kesehatan;
  - b. pusat Blok I-B berada pada ruang kegiatan perdagangan di Jalan Sudanco Supriyadi dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret;
  - c. pusat Blok I-C berada pada ruang kegiatan perdagangan sepanjang Jalan Sansuit Tubun dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret;
  - d. pusat Blok I-D berada pada ruang kegiatan pendidikan berupa Universitas Kanjuruhan di Jalan Sudanco Supriyadi dengan fungsi primer sarana pelayanan umum pendidikan;
  - e. pusat Blok I-E berada pada ruang kegiatan perdagangan berupa Pasar Sukun di Jalan Sudanco Supriyadi dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk tunggal;
  - f. pusat Blok I-F berada pada ruang kegiatan transportasi Stasiun Kota Lama di Jalan Kolonel Sugiono dengan fungsi primer berupa sarana pelayanan umum transportasi;
  - g. pusat Blok I-G berada pada ruang kegiatan perdagangan sepanjang Jalan Kolonel Sugiono dengan fungsi primer berupa perdagangan dan jasa bentuk deret;
  - h. pusat Blok I-H berada pada ruang kegiatan perdagangan pada sepanjang Jalan Kolonel Sugiono dengan fungsi primer berupa perdagangan dan jasa bentuk deret;
  - i. pusat Blok II-A berada pada ruang kegiatan dengan fungsi primer berupa perumahan di Kelurahan Mergosono;
  - j. pusat Blok II-B berada pada ruang kegiatan dengan fungsi primer berupa perumahan di jalan utama Kelurahan Bumiayu;
  - k. pusat Blok II-C berada pada ruang kegiatan berupa perdagangan di Jalan Gadang Bumiayu dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret;

- l. pusat Blok II-D berada pada ruang kegiatan pendidikan di Jalan Raya Tlogowaru dengan fungsi primer berupa sarana pelayanan umum pendidikan;
  - m. pusat Blok II-E berada pada ruang kegiatan perumahan di Kelurahan Buring dengan fungsi primer perumahan;
  - n. pusat Blok II-F berada pada ruang kegiatan perumahan dengan fungsi primer perumahan;
  - o. pusat Blok II-G berada pada ruang kegiatan kesehatan berupa Rumah Sakit Panti Nirmala di Jalan Kolonel Sugiono dengan fungsi primer berupa sarana pelayanan umum kesehatan;
  - p. pusat Blok III-A berada pada ruang kegiatan perkantoran Block Office Kota Malang di Jalan Kolonel Sugiono dengan fungsi primer perkantoran pemerintahan;
  - q. pusat Blok III-B berada pada ruang kegiatan dengan fungsi primer kawasan industri di Kelurahan Arjowinangun;
  - r. pusat Blok III-C berada pada ruang kegiatan dengan fungsi primer perumahan di Kelurahan Tlogowaru;
  - s. pusat Blok III-D berada pada ruang kegiatan pendidikan di Jalan Raya Tlogowaru dengan fungsi sarana pelayanan umum pendidikan;
  - t. pusat Blok IV-A berada pada ruang kegiatan dengan fungsi primer perumahan di Kelurahan Wonokoyo;
  - u. pusat IV-B berada pada ruang kegiatan dengan fungsi primer perumahan di Kelurahan Wonokoyo; dan
  - v. pusat IV-C berada pada ruang kegiatan dengan fungsi perumahan di Kelurahan Wonokoyo.
- (5) Peta sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Arahan Pengembangan

##### Pasal 14

Arahan pengembangan BWP Malang Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan pusat kegiatan baru di Sub BWP II Blok II-F, Sub BWP III Blok III-B, dan Sub BWPIV Blok IV-C;
- b. mempertahankan sekitar sempadan sungai yaitu di sempadan Sungai Brantas, dan Sungai Metro;
- c. mempertahankan perumahan yang sudah ada, meningkatkan akses antar perumahan dan memperbaiki lingkungan yang kumuh dan memiliki kepadatan tinggi di Sub BWPI Blok I-I;
- d. pengembangan perumahan baru melalui konsep infiltrasi di sekitar perumahan yang ada dan meningkatkan akses antar perumahan;
- e. pengembangan perumahan baru di setiap Sub BWP;
- f. pengembangan kawasan industri di Sub BWPIII Blok III-B;
- g. pengembangan kawasan perkantoran berupa perkantoran pemerintahan (block office) di Sub BWPIII Blok III-A;

- h. pengembangan kawasan perdagangan bentuk deret di sepanjang Jalan S. Supriyadi, Jalan Satsuit Tubun, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Gadang Bumiayu di Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-G, Blok I-H dan Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F;
- i. pengembangan jaringan jalan menuju kawasan industri; dan
- j. peningkatan fungsi dan kapasitas jalan Mayjen Sungkono

## BAB VII RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Rencana Pola Ruang

#### Pasal 15

- (1) Perwujudan rencana pola ruang pada BWP Malang Tenggara meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
  - a. zona perlindungan setempat;
  - b. zona RTH;
  - c. zona rawan bencana; dan
  - d. zona suaka alam dan cagar budaya;
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. zona perumahan;
  - b. zona perdagangan dan jasa;
  - c. zona perkantoran;
  - d. zona industri;
  - e. zona sarana pelayanan umum;
  - f. zona peruntukan khusus;
  - g. zona ruang manfaat jalan, zona ruang manfaat jalur kereta api dan badan air; dan
  - h. zona campuran
- (4) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Penetapan Kode Zona dan Sub Zona

#### Pasal 16

- (1) Kode zona pada kawasan lindung terdiri atas :
  - a. zona perlindungan setempat, dengan kode PS, terdiri dari sub zona sempadan sungai, dengan kode PS-1;
  - b. zona RTH, dengan kode RTH, terdiri dari:
    - 1. sub zona RTH taman dan hutan kota, dengan kode RTH-1;
    - 2. sub zona RTH jalur hijau jalan, dengan kode RTH-2; dan
    - 3. sub zona RTH fungsi tertentu, dengan kode RTH-3;

- c. zona rawan bencana, dengan kode RB, terdiri dari:
    1. sub zona rawan bencana longsor, dengan kode RB-1; dan
    2. sub zona rawan bencana kebakaran, dengan kode RB-2;
  - d. zona suaka alam dan cagar budaya, terdiri dari sub zona cagar budaya, dengan kode SC-2.
- (2) Kode zona pada kawasan budidaya terdiri dari:
- a. zona perumahan, dengan kode R, terdiri dari:
    1. sub zona rumah kepadatan tinggi, dengan kode R-2;
    2. sub zona rumah kepadatan sedang, dengan kode R-3; dan
  - b. zona perdagangan dan jasa, dengan kode K, terdiri dari:
    1. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal, dengan kode K-1; dan
    2. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret, dengan kode K-3;
  - c. zona perkantoran, dengan kode KT, terdiri dari:
    1. sub zona perkantoran pemerintah, dengan kode KT-1; dan
    2. sub zona perkantoran swasta, dengan kode KT-2.
  - d. zona industri, dengan kode I, terdiri dari sub zona aneka industri, dengan kode I-4;
  - e. zona sarana pelayanan umum, dengan kode SPU, terdiri dari:
    1. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan, dengan kode SPU-1;
    2. sub zona sarana pelayanan umum transportasi, dengan kode SPU-2
    3. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan, dengan kode SPU-3;
    4. sub zona sarana pelayanan umum olahraga, dengan kode SPU-4;
    5. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya, dengan kode SPU-5; dan
    6. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan, dengan kode SPU-6
  - f. zona peruntukan khusus, dengan kode KH terdiri dari:
    1. sub zona tandon atau reservoir, dengan kode KH-4;
    2. sub zona gardu induk, dengan kode KH-5;
    3. sub zona depo BBM, dengan kode KH-6; dan
    4. sub zona rumah pemotongan hewan, dengan kode KH-7.
  - g. zona ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api, dan badan air, dengan kode RMJ-BA, terdiri dari:
    1. sub zona ruang manfaat jalan, dengan kode RMJ;
    2. sub zona ruang manfaat jalur kereta api, dengan kode RMJ-KA; dan
    3. sub zona badan air, dengan kode BA;
  - h. zona campuran, dengan kode C, terdiri dari
    1. sub zona campuran yang peruntukan ruangnya berfungsi campuran antara perdagangan dan jasa dan perkantoran, dengan kode C-3;
    2. sub zona campuran yang peruntukan ruangnya berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum, dengan kode C-4.

Bagian Ketiga  
Rencana Kawasan Lindung

Paragraf Kesatu  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 17

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari zona sempadan sungai yang direncanakan seluas kurang lebih 62,16 (enam puluh dua koma satu enam) hektar.
- (2) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan melalui :
  - a. fasilitasi penetapan sempadan sungai pada Sungai Metro dan Sungai Brantas dengan lebar 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung;
  - b. pengendalian ketat pada seluruh area sempadan sungai; dan
  - c. pengelolaan area sempadan sungai, meliputi:
    - 1) pengembalian fungsi konservasi sempadan sungai dengan relokasi bangunan yang ada di sempadan sungai; dan
    - 2) pengembangan fungsi konservasi pada area sempadan sungai.

Paragraf Kedua  
Zona RTH

Pasal 18

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ayat (2) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 466,35 (empat ratus enam puluh enam koma tiga lima) hektar, terdiri dari kurang lebih 361,26 (tiga ratus enam puluh satu koma dua enam) hektar pada sub zona RTH taman dan hutan kota, kurang lebih 6,52 (enam koma lima) hektar pada sub zona RTH jalur hijau jalan, median jalan, dan pulau jalan, dan kurang lebih 98,56 (sembilan puluh delapan koma lima enam) hektar pada sub zona RTH fungsi tertentu.
- (2) Sub zona RTH taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
  - a. penyediaan taman kota pada sub BWPI, sub BWPII, sub BWPIII, dan sub BWPIV.
  - b. pengembangan hutan kota pada:
    1. sub BWPI Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H,
    2. sub BWP II Blok II-A, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F, dan Blok II-G;
    3. sub BWPIII Blok III-B, dan Blok III-C, dan
    4. sub BWPIV Blok IV-A, Blok IV-B, dan Blok IV-C;
- (3) sub zona RTH jalur hijau jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
  - a. pengembangan jalur hijau jalan sepanjang jalur jalan, pada sub BWP I, sub BWPII, sub BWPIII, dan sub BWPIV;
  - b. pengembangan jalur hijau pejalan kaki, pada sub BWPI, sub BWP II, sub BWPIII, dan sub BWPIV;

- c. pengembangan pulau jalan, pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, dan sub BWPIV;
- (4) sub zona RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
  - a. pengembangan jalur hijau SUTT:
    - 1. sub BWPI Blok I-B, Blok I-C;
    - 2. sub BWP II Blok II-D, Blok II- E dan Blok II-F;
    - 3. sub BWP III Blok III-A, Blok III-C dan Blok III-D; dan
    - 4. sub BWPIV Blok IV-A, Blok IV-B dan Blok IV-C;
  - b. pengembangan RTH sempadan sungai dan saluran irigasi, pada Sub BWPI, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWPIV ;
  - c. pengembangan RTH sempadan jalur kereta api meliputi sub BWP I Blok I-D, Blok I-F, Blok I-G, sub BWP II Blok II-G
  - d. pengembangan RTH makam di:
    - 1. sub BWPI Blok I-A, Blok I-E, Blok I-G;
    - 2. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-G;
    - 3. Sub BWPIV Blok IV-B

Paragraf Ketiga  
Zona Rawan Bencana

Pasal 19

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c adalah seluas kurang lebih 118,45 (seratus delapan belas koma empat lima) hektar, terdiri dari kurang lebih 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga Sembilan) hektar pada sub zona rawan bencana longsor, dan kurang lebih 91,06 (sembilan satu koma nol enam) hektar pada sub zona rawan bencana kebakaran.
- (2) Sub zona rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangani melalui pengendalian rawan bencana berupa bencana alam tanah longsor pada :
  - 1. sub BWPI Blok I-C, Blok I-H, Blok I-I;
  - 2. sub BWP II Blok II-A, Blok II-B; dan
  - 3. sub BWP III Blok III-A serta Blok III-B;
 berupa :
  - a. pembangunan bangunan penahan tanah atau perkuatan tebing sungai di sekitar sungai;
  - b. pengembangan rute evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama serta tempat evakuasi sementara diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi gedung serbaguna dan lapangan olahraga.
- (3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangani melalui pengendalian rawan bencana berupa kebakaran meliputi :
  - 1. sub BWP I Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-H, Blok I-I; dan
  - 2. sub BWPII Blok II-B, Blok II-F.
- (4) Pengendalian rawan bencana berupa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran;

- b. penyediaan jalan yang dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran untuk jalur respon bencana sebagai bentuk mitigasi bencana struktural;
- c. pengembangan rute evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama; dan
- d. penetapan fasilitas umum yang berupa gedung serba guna dan lapangan olahraga, sebagai tempat evakuasi sementara.

Paragraf Keempat  
Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 20

- (1) Zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d direncanakan seluas kurang lebih 9,6 (sembilan koma enam) hektar, terdiri dari kurang lebih 9,6 (sembilan koma enam) hektar pada sub zona cagar budaya.
- (2) Sub zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benda cagar budaya dengan klasifikasi bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya pada Sub BWP I Blok I-A, Blok I-F,; Sub BWP II Blok II-G;
- (3) Sub zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
  - a. pelaksanaan heregistrasi ulang cagar budaya;
  - b. penetapan status benda cagar budaya;
  - c. perlindungan cagar budaya yang ada;
  - d. pengembangan cagar budaya yang ada; dan
  - e. pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya ekonomi lokal dan daya tarik wisata budaya.

Bagian Keempat  
Rencana Kawasan Budidaya

Paragraf Kesatu  
Zona Perumahan

Pasal 21

- (1) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a direncanakan seluas kurang lebih 2.015,48 (dua ribu lima belas koma empat delapan) hektar pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang;
- (2) Sub zona rumah kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 161,13 (seratus enam puluh satu koma satu tiga) hektar meliputi:
  - a. pengembangan sub zona rumah kepadatan tinggi pada Sub BWP I dan Sub BWP II;
  - b. perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan tinggi serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - c. penyediaan akses internal dan eksternal penghubung antar perumahan dan kawasan permukiman.

- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 1.854,35 (seribu delapan ratus lima puluh empat koma tiga lima) hektar meliputi :
- a. pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang pada:
    1. Sub BWPI pada Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F dan Blok I-G;
    2. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, dan Blok II-F;
    3. Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-D; dan
    4. Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B dan Blok IV-C;
  - b. perbaikan kualitas lingkungan di :
    1. Sub BWPI Blok I-H dan Blok I-I;
    2. Sub BWP II Blok II-A dan Blok II-B;
  - c. penyediaan RTH berada pada :
    1. Sub BWPI Blok I-C dan Blok I-F;
    2. Sub BWP II Blok II-D dan Blok II-F;
    3. Sub BWP III Blok III-B dan Blok III-D; dan
    4. Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B dan Blok IV-C.
  - d. penyediaan akses internal dan eksternal penghubung antar perumahan dan kawasan permukiman.

Paragraf Kedua  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 22

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 127,47 (seratus dua puluh tujuh koma empat tujuh) hektar yang meliputi sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dan sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) hektar meliputi :
- a. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pusat perbelanjaan dikembangkan pada Sub BWPII dan Sub BWPIV:
    1. sub BWP II Blok II-C dan Blok II-D; dan
    2. sub BWP III Blok III-A
  - b. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pasar tradisional dikembangkan pada Sub BWP III;
  - c. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan dikembangkan pada:
    1. sub BWPI Blok I-E, dan Blok I-H
    2. sub BWP II Blok II-F;
    3. sub BWP III Blok III-D; dan
    4. sub BWP IV Blok IV-C.
  - d. sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya meliputi :
    1. sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya yang sudah ada pada di sub BWPI, sub BWP II, sub BWP III, dan sub BWPIV dipertahankan kegiatannya;

2. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya dikembangkan pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, dan sub BWP IV;
  - e. Penyediaan dan/atau pengembangan lokasi bagi sektor informal dan ekonomi kreatif pada sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 74,59 (tujuh puluh empat koma lima sembilan) hektar meliputi:
- a. pemantapan dan pengembangan sub zona perdagangan dan jasa deret yang terdapat terdapat di sub BWP I , sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP IV;
  - b. pembatasan toko modern yang didirikan di zona perumahan; dan
  - c. penyediaan dan/atau pengembangan lokasi bagi sektor informal dan ekonomi kreatif di sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret.

Paragraf Ketiga  
Zona Perkantoran

Pasal 23

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c direncanakan seluas kurang lebih 17,76 (tujuh belas koma tujuh enam) hektar meliputi sub zona perkantoran pemerintah;
- (2) Sub zona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
  - a. pemantapan fungsi pada kantor pemerintah eksisting yang berupa kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor dinas yang tersebar di Sub BWP I, II, III, dan IV;
  - b. optimalisasi fungsi pada kantor pemerintah eksisting melalui pengembangan kantor instansi vertikal yang tersebar di Sub BWP I, II, III, dan IV; dan
  - c. penyediaan prasarana pendukung Sub zona perkantoran pemerintah.

Paragraf Keempat  
Zona Industri

Pasal 24

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d direncanakan seluas kurang lebih 86,59 (delapan puluh enam koma lima sembilan) hektar, yang meliputi rencana sub zona aneka industri;
- (2) Sub zona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
  - a. pemantapan sub zona aneka industri yang sudah ada terdapat pada sub BWPI, Sub BWP II, dan Sub BWP III; dan
  - b. pengembangan kawasan industri dengan komoditas aneka industri pada sub BWP III Blok III-B
- (3) Peningkatan pembinaan terhadap pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- (4) Penyediaan ruang terbuka hijau berbentuk jalur sebagai sabuk hijau kawasan industri pada Sub BWP III Blok III-B.

- (5) Penyediaan infrastruktur dasar di dalam persil kegiatan yang setidaknya meliputi instalasi pengolahan limbah padat, instalasi pengolahan air limbah, dan drainase secara terpadu.

Paragraf Kelima  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 25

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf e direncanakan seluas kurang lebih 71,78 (tujuh puluh satu koma tujuh delapan) hektar, yang terdiri dari:
- a. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan;
  - b. sub zona sarana pelayanan umum transportasi;
  - c. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan;
  - d. sub zona sarana pelayanan umum olahraga;
  - e. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya, dan
  - f. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas kurang lebih 37,22 (tiga puluh tujuh koma dua dua) hektar dikembangkan pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, dan sub BWP IV, meliputi :
- a. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/KB/RA/BA atau sederajat di lokasi yang sudah ada;
  - b. pengembangan kegiatan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/KB/RA/BA atau sederajat sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan pada zona perumahan;
  - c. pengembangan sub zona sarana pelayanan umum sekolah dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI)/sederajat meliputi pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan eksisting berupa kegiatan taman kanak-kanak dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan pada zona perumahan;
  - d. pengembangan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat meliputi pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan yang berada pada sub BWP I; sub BWP II; dan sub BWP III sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan skala BWP;
  - e. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau sederajat meliputi pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan yang berada pada sub BWP I; sub BWP II; dan sub BWP III sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan skala BWP;
  - f. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan skala kota dan regional.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 3,02 (tiga koma nol dua) hektar meliputi :
- a. pemantapan sub zona transportasi berupa stasiun kereta api yang terdapat terdapat di Sub BWP I Blok I-F;

- b. pengembangan terminal barang di sub BWP II Blok II-D;
  - c. peningkatan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana terminal pada Sub BWP II Blok II-D;
  - d. pengembangan sub zona transportasi berupa sub unit terminal pada:
    - 1. sub BWPI Blok I-E; dan
    - 2. sub BWP II Blok II-D.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas kurang lebih 11,96 (sebelas koma sembilan enam) hektar meliputi :
- a. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan dengan kegiatan rumah sakit direncanakan melalui:
    - 1. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit yang terdapat pada sub BWP I Blok I-A dan sub BWP II Blok II-G;
    - 2. pengembangan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit pada Sub BWP III Blok III-A;
  - b. pengembangan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan kegiatan puskesmas, puskesmas pembantu, dan sarana kesehatan lainnya terdapat pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, dan sub BWP IV.
- (5) Sub zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan seluas kurang lebih 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektar melalui :
- a. pemantapan sub zona olahraga berupa lapangan olahraga yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan
  - b. pengembangan sub zona olahraga berupa lapangan olahraga pada pengembangan perumahan baru.
- (6) Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan seluas 5,27 (lima koma dua tujuh) hektar melalui:
- a. pemantapan sarana pelayanan umum sosial budaya pada Sub BWP I Blok I-E dan Sub BWP IV Blok IV-B;
  - b. pengembangan ruang kegiatan gedung pertemuan dan/atau balai warga pada tiap Sub BWP sebagai bagian dari penyediaan sarana sosial budaya pada zona perumahan.
- (7) Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan seluas 9,53 (sembilan koma lima tiga) hektar melalui:
- a. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan berupa masjid dan langgar/musholla yang terdapat di tiap Sub BWP;
  - b. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan berupa gereja di tiap Sub BWP;
  - c. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan eksisting lainnya di tiap Sub BWP;
  - d. pengembangan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan berupa masjid, langgar/musholla, gereja, pura, dan vihara pada tiap Sub BWP sesuai dengan skala pelayanan;
  - e. pengembangan pusat kegiatan agama Islam berada di Sub BWP III-B.

Paragraf Keenam  
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 26

- (1) Rencana zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f direncanakan seluas kurang lebih 9,29 (sembilan koma dua sembilan) hektar yang terdiri dari sub sub zona tandon atau reservoir, sub zona gardu induk, sub zona depo BBM, dan sub zona Rumah Pemotongan Hewan.
- (2) Sub zona tandon atau reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar melalui pemantapan tandon eksisting pada Sub BWPI Blok I-B;
- (3) Sub zona gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektar melalui pemantapan gardu induk eksisting pada Sub BWPI Blok I-B;
- (4) Sub zona depo BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas 4,61 (empat koma enam satu) hektar melalui pemantapan kegiatan eksisting pada Sub BWPI Blok I-F;
- (5) Sub zona rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas 1,55 (satu koma lima lima) hektar melalui pemantapan kegiatan eksisting dan pengembangan kegiatan yang mendukung fungsi sub zona secara terbatas yang berada pada Sub BWPI Blok I-F.

Paragraf Ketujuh  
Zona Ruang Manfaat Jalan, Jalur Kereta Api, dan Badan Air

Pasal 27

- (1) Rencana zona peruntukan ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api dan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g direncanakan seluas kurang lebih 205,69 (dua ratus lima koma enam sembilan) hektar, terdiri dari kurang lebih 140,95 (seratus empat puluh koma sembilan lima) hektar sub zona ruang manfaat jalan, kurang lebih 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) hektar sub zona ruang manfaat jalur kereta api, dan kurang lebih 60,75 (enam puluh koma tujuh lima) hektar sub zona badan air;
- (2) Sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) direncanakan dengan pengembangan fungsi jalan yang ada di setiap Sub BWP yang meliputi :
  - 1) jalan kolektor primer;
  - 2) jalan arteri sekunder;
  - 3) jalan kolektor sekunder;
  - 4) jalan lokal sekunder; dan
  - 5) jalan lingkungan.
- (3) Sub zona ruang manfaat jalur kereta api (RMJ-KA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pemantapan fungsi jalur kereta api; stasiun kereta api; dan fasilitas operasi kereta api yang berada di Sub BWP I Blok I-D, Blok I-F, Blok I-G, dan Sub BWPII Blok II-G.
- (4) Sub zona badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pemantapan fungsi konservasi badan air yang berada di Sub BWP, Sub BWPII, Sub BWPIII dan Sub BWPIV;

Paragraf Kedelapan  
Zona Campuran

Pasal 28

- (1) Rencana zona campuran dengan luas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h meliputi sub zona campuran perkantoran dan perdagangan dan jasa serta sub zona peruntukan campuran perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum.
- (2) Sub zona campuran perkantoran dan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar meliputi pengembangan kegiatan pada sub zona campuran perkantoran dan perdagangan dan jasa di Sub BWP I Blok I-F.
- (3) Sub zona campuran perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 4,66 (empat koma enam enam) hektar meliputi pengembangan kegiatan pada sub zona campuran perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum di Sub BWP I Blok I-C dan Blok I-H.
- (3) Sub zona campuran perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 4,66 (empat koma enam enam) hektar meliputi pengembangan kegiatan pada sub zona campuran perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum di Sub BWP I Blok I-C dan Blok I-H.
- (4) Pengembangan fasilitas parkir dan gedung parkir sebagai bagian dari zona campuran

BAB VIII  
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f. meliputi :

- a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. Rencana pengembangan jaringan energi/ kelistrikan;
- c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. Rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 30

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a. meliputi :

- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jaringan perkeretaapian;
- c. Sistem jalur pedestrian dan jalur sepeda;
- d. Sistem pelayanan angkutan umum dan parkir; dan
- e. Sistem jaringan pergerakan lainnya.

Paragraf Kedua  
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 31

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a. meliputi :
  - a. jaringan jalan kolektor primer-I;
  - b. jaringan jalan kolektor primer-II;
  - c. jaringan jalan arteri sekunder;
  - d. jaringan jalan kolektor sekunder;
  - e. jaringan jalan lokal sekunder;
  - f. jaringan jalan lingkungan;
  - g. persyaratan teknis jalan; dan
  - h. persyaratan teknis kelengkapan jalan.
- (2) Rencana jaringan jalan kolektor primer-I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. meliputi Jalan Laksamana Martadinata, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Satsuit Tubun, dan Jalan S. Supriyadi (menuju Kepanjen);
- (3) Rencana jaringan jalan kolektor primer-II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. meliputi Jalan Kolonel Sugiono
- (4) Rencana jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. meliputi
  - a. pengembangan jalan arteri sekunder-I meliputi Jalan Arif Margono dan Jalan Mayjen Sungkono;
  - b. pengembangan jalan arteri sekunder-II meliputi Jalan Rajasa, jalan menuju kawasan industri Tlogowaru; dan
  - c. pengembangan jalan arteri sekunder-III meliputi Jalan Muharto, Jalan Zaenal Zakse.
- (5) Rencana jaringan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. meliputi:
  - a. pengembangan jalan kolektor sekunder-I adalah Jalan Kebalen Wetan, Jalan Sartono, Jalan Raya Puncak Buring Indah, Jalan Lowokdoro, Jalan Raya Tlogowaru; dan
  - b. pengembangan jalan kolektor sekunder-II adalah Jalan Parseh Jaya, Jalan Raya Arjowinangun.

- (6) Rencana jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d. adalah pengembangan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Raya Walet, Jalan Halmahera, Jalan Niaga, Jalan Susanto, Jalan Janti Barat, Jalan Teluk Cendrawasih, Jalan Sonokeling.
- (7) Rencana jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e. adalah pengembangan jalan lingkungan di luar jalan yang telah ditetapkan menjadi jalan arteri sekunder dan/atau jalan kolektor primer-I dan kolektor sekunder, dan/atau jalan lokal.
- (8) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e. meliputi:
  - a. ruang manfaat jalan pada jalan arteri primer paling sedikit 11 (sebelas) meter;
  - b. ruang manfaat jalan pada jalan arteri sekunder paling sedikit 11 (sebelas) meter;
  - c. ruang manfaat jalan pada jalan kolektor sekunder paling sedikit 9 (sembilan) meter;
  - d. ruang manfaat jalan pada jalan lokal sekunder paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter; dan
  - e. ruang manfaat jalan pada jalan lingkungan paling sedikit 3,5 – 6,5 meter.
- (9) Persyaratan teknis kelengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (10) Peta rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai ayat (6), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga  
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 32

- (1) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b. meliputi konservasi sempadan jalur kereta api ditetapkan sebesar 23 meter dari as jalan kereta api pada titik perpotongan as jalan jalur kereta api dengan as jalan raya.
- (2) Peta rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat  
Sistem Jaringan Pedestrian dan Jalur Sepeda

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c. meliputi :
  - a. jalur pedestrian
  - b. jalur sepeda
- (2) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. jalur pedestrian yang sudah ada terdapat di Jalan S. Supriyadi, Jalan Gadang Bumiayu, Jalan Kolonel Sugiono;

- b. jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum; dan
  - c. jalur pedestrian berupa koridor meliputi jalur pedestrian sepanjang arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sesuai dengan persyaratan teknis jalan masing-masing; dan
  - d. pada jalur pejalan kaki yang saat ini banyak digunakan untuk PKL, untuk menempatkan barang dan parkir akan lebih dioptimalkan untuk penggunaannya untuk pejalan kaki.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi:
- a. pengembangan jalur sepeda tipe lajur sepeda melalui Jalan S. Supriyadi - Universitas Kanjuruhan;
  - b. pengembangan jalur sepeda tipe on street melalui pemberian tanda khusus, menyatu dengan jalur kendaraan bermotor yang sudah ada dan tidak diberi pembatas khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud.
- (4) Peta rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kelima  
Sistem Pelayanan Angkutan Umum dan Parkir

Pasal 34

- (1) Rencana sistem pelayanan angkutan umum dan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d. meliputi :
- a. rencana sistem pelayanan angkutan umum; dan
  - b. rencana sistem parkir.
- (2) Rencana sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. angkutan umum yang sudah ada berasal dan menuju eks Terminal Gadang dan Terminal Hamid Rusdi;
  - b. rencana bus pepadu moda dengan rute koridor Bandar udara Abdulrahman Saleh – Jalan Bugis – Jalan Mangliawan – Jalan Laksamana Adi Sucipto – Jalan Raden Panji Suroso – Jalan Raden Intan – Jalan Taman Raden Intan – Terminal Bus Arjosari – Jalan Raden Intan – Jalan Raden Panji Suroso – Jalan Letjend SunandarPriyosudarmo – Jalan Tumenggung Suryo – Jalan Trunojoyo – Stasiun KA Kota Baru – Jalan Panglima Sudirman – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Laksamana Martadinata – Jalan Stasiun KA Kota Lama – Jalan Kolonel Soegiono – Terminal Bus Gadang; dan
  - c. rencana bus kota (utara-selatan) dengan rute Jalan Bale Arjosari – Jalan A. Yani Utara – Jalan Raden Intan – Jalan Taman R. Intan – Jalan Jend. A. Yani – Jalan Letjend Suparman – Jalan Letjend Sutoyo – Jalan Jaksa Agung Suprpto – Jalan Jend. Basuki Rahmad – Jalan Merdeka Barat – Jalan Merdeka Selatan – Jalan Pasar Besar – Jalan Laksamana Martadinata – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan A. Rahman Hakim – Jl. Satsuit Tubun – Jalan Sudanco Supriadi – Jalan Arief Margono.

- (3) Rencana sistem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi :
- a. penerapan sistem tarif progresif maupun parkir berlangganan;
  - b. pembatasan parkir di dalam ruang milik jalan atau parkir secara on street yang hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas/atau marka jalan, dan paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
  - c. penyediaan parkir off street diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan-jalan utama yang meliputi Jalan Sudanco Supriyadi, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Satsuit Tubun;
  - d. penyediaan parkir off street di dalam persil maupun menyatu dengan bangunan dan basement bagi kegiatan perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, dan sarana pelayanan umum;
  - e. pengembangan parkir komunal; dan
  - f. pengembangan fasilitas parkir dan gedung parkir
- (4) Peta rencana sistem pelayanan angkutan umum dan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keenam  
Jaringan Pergerakan Lainnya

Pasal 35

- (1) Rencana jaringan pergerakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf e. meliputi:
- a. halte;
  - b. terminal;
  - c. sub unit terminal;
- (2) Rencana halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:
- a. pemantapan fungsi dan desain halte eksisting yang terdapat di tiap Sub BWP; dan
  - b. pengembangan halte di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWPIV.;
- (3) Rencana terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. berupa pemantapan fungsi dan kegiatan terminal Hamid Rusdi.
- (4) Rencana sub unit terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. berupa pengembangan sub unit terminal di BWP Malang Tenggara terdapat di Sub BWPI, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWPIV.

Bagian Ketiga  
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/ kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b. meliputi :
  - a. pengembangan jaringan distribusi primer;
  - b. pengembangan jaringan distribusi sekunder; dan
  - c. pengembangan dan pemantapan layanan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT yang ada melewati :
  - a. sub BWPI Blok I-C;
  - b. sub BWPII Blok II-D, Blok II- E dan Blok II-F;
  - c. sub BWPIII Blok III-A, Blok III-C dan Blok III-D; dan
  - d. sub BWPIV Blok IV-A, Blok IV-B dan Blok IV-C.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang ada melewati Jalan S. Supriyadi, Jalan Satsuit Tubun, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Mayjen Sungkono.
  - b. jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) pada BWP Malang Tenggara; dan
  - c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat pada pengembangan perumahan baru.
- (4) Pengembangan dan pemantapan layanan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan, peningkatan cakupan, dan pemutakhiran teknologi penerangan jalan pada lokasi pelayanan penerangan jalan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya, dan jalan lingkungan;
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan energi / kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c. meliputi :
  - a. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel; dan
  - b. jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel;
- (2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi :
  - a. pemantapan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang ada sudah melayani seluruh BWP Malang Tenggara; dan
  - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon pada pengembangan perumahan baru.

- (3) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi :
  - a. pemantapan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu Base Transfer Station (BTS) yang tersebar di tiap Sub BWP;
  - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel pada area yang belum terlayani oleh jaringan nirkabel; dan
  - c. optimalisasi menara telekomunikasi melalui pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
  - a. jaringan air minum berupa PDAM;
  - b. jaringan air minum berupa sistem komunal; dan
  - c. bak penampungan dan reservoir.
- (2) Jaringan air minum berupa PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum berupa PDAM eksisting di tiap Sub BWP;
- (3) Jaringan air minum berupa PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pada zona perumahan kepadatan tinggi;
- (4) Bak penampungan dan reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di tiap Sub BWP;
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf e. meliputi :
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. pengelolaan drainase.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sungai yaitu Sungai Brantas, dan Sungai Metro.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saluran Jalan S. Supriyadi, Jalan Muharto, Jalan Satsuit Tubun, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Mayjen Sungkono.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran yang terdapat di tiap-tiap perumahan.

- (5) Pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. pengelolaan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah Aliran Sungai.
  - b. Pengembangan eco-drainase;
  - c. penanganan saluran meliputi:
    - 1) normalisasi saluran;
    - 2) pembuatan sudetan;
    - 3) pembuatan saluran baru; dan
    - 4) pembuatan inlet.
  - d. peresapan air dalam tanah meliputi:
    - 1) sumur resapan air hujan;
    - 2) biopori; dan
    - 3) bozem dan pemanfaatan teknologi tampungan air bawah tanah.
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:
  - a. Sistem perpipaan/sistem terpusat;
  - b. Sistem komunal; dan
  - c. Sistem setempat.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT);
  - b. Pengembangan fasilitas instalasi pengolahan air limbah di Kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan Kebonsari;
- (3) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan pada skala Blok berbasis sub DAS di Kelurahan Sukun, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Gadang, Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Kota Lama, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo, dan Kelurahan Buring;
- (4) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c meliputi penyediaan pengolah limbah secara mandiri / individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, rumah sakit, industri dan kegiatan yang sejenis;
- (5) Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja direncanakan di luar BWP Malang Timur Laut yakni di Supit Urang yang berada di BWP Malang Barat;
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (7) Peta rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Paragraf Kesatu

Pasal 41

Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf g meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
- b. rencana rute evakuasi bencana.

Paragraf Kedua

Pasal 42

- (1) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a meliputi :
  - a. pengembangan sistem pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui pengurangan sampah.
  - b. mempertahankan TPS yang sudah ada meliputi:
    - 1) sub BWPI Blok I-A, Blok I-D, Blok I-F, dan Blok I-H;
    - 2) sub BWPII Blok II-D; dan
    - 3) sub BWPIII Blok III-A;
  - c. pengembangan sistem persampahan melalui penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter, meliputi:
    - 1) sub BWPI Blok I-B, Blok I-C, Blok I-E, Blok I-G, dan Blok I-I;
    - 2) sub BWPII Blok II-C;
    - 3) sub BWPIII Blok III-B, Blok III-C; dan
    - 4) sub BWPIV Blok IV-C;
  - d. pengembangan TPS 3R di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWPIV, dan Sub BWPV;
  - e. optimalisasi moda pengangkutan sampah dan rute pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Supit Urang pada BWP Malang Barat.
- (2) Peta rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga

Pasal 43

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa rute evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b meliputi:
  - a. penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor; dan
  - b. penanganan rawan bencana non alam berupa kebakaran.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor sepanjang Sungai Brantas dan Sungai Bango.

- (3) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi korban bencana longsor meliputi:
- a. rencana tempat evakuasi korban bencana longsor diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi gedung serba guna dan lapangan olahraga, di antaranya titik evakuasi Lapangan Bumiayu dan Lapangan Ciptomulyo
  - b. rencana rute evakuasi bencana longsor meliputi:
    1. titik Evakuasi Lapangan Bumiayu dengan rute Jalan Muharto gang - Jalan Muharto – Jalan Mayjen Sungkono – Lapangan Bumiayu; dan
    2. titik Evakuasi Lapangan Ciptomulyo dengan rute Jalan Mergosono gang – Jalan Laksamana Martadinata – Lapangan Ciptomulyo.
- (4) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana non alam berupa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan hidran kebakaran pada sub zona rumah kepadatan tinggi yang berada di Kelurahan Mergosono, Kotalama, dan Ciptomulyo
- (5) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi korban bencana kebakaran meliputi:
- a. rencana tempat evakuasi korban bencana kebakaran diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi gedung serba guna dan lapangan olahraga, di antaranya titik Lapangan Bumiayu dan Lapangan Ciptomulyo.
  - b. rencana rute evakuasi bencana kebakaran meliputi:
    1. titik Evakuasi Lapangan Bumiayu dengan rute Jalan Muharto gang - Jalan Muharto – Jalan Mayjen Sungkono – Lapangan Bumiayu;
    2. titik Evakuasi Lapangan Ciptomulyo dengan rute Jalan Mergosono gang – Jalan Laksamana Martadinata – Lapangan Ciptomulyo; dan
    3. titik Evakuasi Lapangan Ciptomulyo dengan rute Ciptomulyo gang – Lapangan Ciptomulyo.
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 44

Pengembangan jaringan pergerakan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan irigasi dan jaringan air limbah dilakukan melalui pemanfaatan ruang di dalam bumi (RDB) berupa multi purpose deep tunnel (MPDT) dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX  
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu  
Penetapan Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan

Pasal 45

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi Sub BWP I dengan fungsi utama perumahan, perdagangan dan jasa dan pendidikan.
- (2) Peta Sub BP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Rencana Penanganan Sub BWP Prioritas

Pasal 46

Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 meliputi:

- a. tema penanganan adalah perumahan, perdagangan jasa dan pendidikan  
Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:
- b. tema penanganan adalah perumahan, perdagangan jasa dan pendidikan
- c. kebutuhan penanganan Sub BWPI meliputi:
  1. penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL koridor Jalan Kolonel Sugiono;
  2. penataan intensitas bangunan pada perumahan padat di Jalan Kolonel Sugiono;
  3. penyediaan RTH koridor jalan;
  4. pengaturan sistem perparkiran; dan
  5. penataan sistem drainase.

BAB X  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Paragraf Kesatu  
Perwujudan Tata Pola Ruang

Pasal 47

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

## Pasal 48

Perwujudan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi :

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

## Paragraf Kedua

### Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

## Pasal 49

(1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. rencana zona lindung; dan
- b. rencana zona budidaya.

(2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi :

- a. penetapan zona lindung BWP Malang Tenggara dengan program utama penetapan zona lindung BWP Malang Tenggara meliputi:
  1. zona perlindungan setempat;
  2. zona RTH;
  3. zona rawan bencana; dan
  4. zona suaka alam dan cagar budaya.
- b. mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi:
  1. pembangunan plengsengan di sekitar sungai;
  2. pengembangan RTH pada sempadan sungai yang tidak terdapat bangunan;
  3. pengembangan median jalan dengan fungsi RTH di tengahnya sehingga menghindari adanya penggunaan lahan terutama menjadi perumahan di bawah jaringan SUTT; dan
  4. pengembangan RTH disepanjang jalur kereta api.
- c. mengoptimalkan dan memelihara RTH untuk peningkatan kualitas lingkungan meliputi :
  1. pengembangan RTH sehingga mencapai 30% (tiga puluh persen) dari luas perkotaan, dengan mengembangkan RTH pekarangan, RTH taman, RTH Hutan Kota RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu; dan
  2. perawatan dan pemeliharaan RTH yang ada agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- d. memelihara benda cagar budaya meliputi:
  1. pemeliharaan dan pelestarian benda, bangunan, dan struktur bernilai sejarah yang menjadi daya tarik wisata melalui kegiatan penelitian;
  2. pemeliharaan dan pelestarian benda, bangunan, dan struktur bernilai sejarah yang menjadi daya tarik wisata melalui kegiatan revitalisasi;
  3. pemeliharaan dan pelestarian benda, bangunan, dan struktur bernilai sejarah yang menjadi daya tarik wisata melalui kegiatan adaptasi;

- e. perlindungan dan penanganan zona rawan bencana meliputi:
  1. penanganan sub zona rawan bencana longsor meliputi pembangunan bangunan penahan tanah atau perkuatan tebing, penyediaan infrastruktur pada jalan-jalan utama, penyediaan sarana evakuasi.
  2. penanganan sub zona rawan kebakaran meliputi penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air, penyediaan jalan yang dapat dijangkau kendaraan pemadam dan rute evakuasi bencana.
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan zona perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Malang Tenggara meliputi:
    1. pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat;
    2. perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang;
    3. penyediaan RTH; dan
    4. akses utama menuju rumah kepadatan rendah dilengkapi dengan median jalan yang berfungsi sebagai RTH.
  - b. zona perdagangan dan jasa sebagai dampak perkembangan BWP Malang Tenggara meliputi:
    1. pengembangan pusat perbelanjaan pada:
      - a) sub BWPII Blok II-C dan Blok II-D; dan
      - b) sub BWPIII Blok III-A.
    2. pengembangan pasar lingkungan pada:
      - a) sub BWPII Blok II-F;
      - b) sub BWPIII Blok III-D; dan
      - c) sub BWPIV Blok IV-C.
    3. pengembangan toko, warung, kios di setiap Sub BWP;
    4. pengembangan perdagangan dan jasa bentuk deret pada:
      - a) sub BWPII Blok II-C dan Blok II-D; dan
      - b) sub BWPIII Blok III-A, Blok III-C dan Blok III-D;
    5. penyediaan ruang bagi sektor informal dan ekonomi kreatif terutama pada pusat perdagangan dan jasa;
    6. penyediaan lahan parkir yang memadai; dan
    7. penyediaan RTH yang dapat berfungsi sebagai taman dan tanaman peneduh parkir kendaraan.
  - c. zona perkantoran berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah meliputi jalur pejalan kaki, RTH dan parkir yang memadai.
  - d. zona industri berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona aneka industri meliputi :
    1. pemantapan sub zona aneka industri yang sudah ada terdapat pada sub BWPI, Sub BWPII, dan Sub BWPIII,
    2. pengembangan kawasan industri dengan komoditas aneka industri pada sub BWPIII Blok III-B,
    3. penyediaan RTH dan lahan parkir yang memadai dan
    4. memberikan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

- e. pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Tenggara meliputi :
  1. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan meliputi pemerataan taman kanak-kanak dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada pengembangan perumahan baru;
  2. sub zona sarana pelayanan umum transportasi meliputi pemantapan kegiatan pada Terminal Hamid Rusdi dan Stasiun Kota Lama;
  3. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit meliputi :
    - a) pemantapan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit yang terdapat pada sub BWP I Blok I-A dan sub BWP II Blok II-G;
    - b) pengembangan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit pada Sub BWP III Blok III-A;
    - c) pengembangan fasilitas kesehatan sesuai skala pelayanan.
  4. sub zona sarana pelayanan umum olahraga berupa lapangan olahraga dikembangkan pada pengembangan perumahan baru
  5. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan berupa masjid, langgar/musholla, pura, vihara dan gereja dikembangkan di tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan skala pelayanan.
- f. pengembangan zona peruntukan khusus untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Tenggara meliputi:
  1. mempertahankan dan memantapkan fungsi gardu induk yang sudah ada;
  2. mempertahankan dan memantapkan fungsi depo BBM yang sudah ada;
  3. mempertahankan dan memantapkan rumah pemotongan hewan yang sudah ada.
- g. pengembangan zona ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api dan badan air, meliputi:
  1. sub zona ruang manfaat jalan yang ada di setiap sub BWP meliputi jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan;
  2. sub zona ruang manfaat jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api di Sub BWPI dan Sub BWP II;
  3. sub zona badan air meliputi air sungai yang berada di sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III dan Sub BWPIV.
- h. Pengembangan zona campuran pada Sub BWP I Blok I-C, Blok I-F, dan Blok I-H.

### Paragraf Ketiga

#### Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

#### Pasal 50

- (1) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan pergerakan;
  - b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
  - d. pengembangan jaringan air minum;

- e. pengembangan jaringan drainase;
  - f. pengembangan jaringan irigasi;
  - g. pengembangan jaringan air limbah; dan
  - h. pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Penetapan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, jaringan jalan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan lingkungan;
  - b. pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona maupun berupa koridor;
  - c. rencana bus pepadu moda dengan rute koridor Bandar udara Abdulrahman Saleh hingga Terminal Bus Hamid Rusdi dan rencana bus kota (utara-selatan);
  - d. jaringan pergerakan lainnya berupa halte dikembangkan di Sub BWP I Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D dan Blok I-H;
  - e. rencana pengembangan sub unit terminal di BWP Malang Tenggara terdapat pada :
    1. sub BWPI Blok I-E; dan
    2. sub BWPII Blok II-D.
  - f. pembatasan parkir on street di sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sedangkan untuk jalan arteri primer (jalan provinsi) diarahkan untuk parkir off street;
  - g. rencana jalur sepeda pada Jalan S. Supriyadi, Universitas Kanjuruhan; dan
  - h. pengembangan fungsi dan kapasitas Jalan Mayjen Sungkono
- (3) Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi:
- a. pengamanan area sekitar SUTT;
  - b. pengembangan median jalan dengan fungsi RTH di tengahnya sehingga menghindari adanya penggunaan lahan terutama menjadi perumahan di bawah jaringan SUTT;
  - c. pengembangan jaringan SUTM pada perumahan baru yang berada di jalan-jalan utama; dan
  - d. pengembangan jaringan SUTR meliputi seluruh jalan di BWP Malang Tenggara.
- (4) Penetapan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dikembangkan pada pengembangan perumahan baru;
  - b. pengembangan Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel dikembangkan pada pengembangan perumahan baru;
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari PLN.
- (5) Penetapan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Jaringan air minum berupa PDAM dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP IV; dan
  - b. pengembangan sumur bor diarahkan pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWPIV.

- (6) Penetapan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. meliputi :
  - a. pengelolaan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah Aliran Sungai;
  - b. penanganan saluran berupa normalisasi saluran, pembuatan saluran, pembuatan saluran baru, dan pembuatan inlet; dan
  - c. peresapan air dalam tanah berupa sumur resapan air hujan, biopori dan bozem.
- (7) Penetapan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, rumah sakit, industri dan kegiatan yang sejenis;
  - b. pengembangan fasilitas instalasi pengolahan air limbah di Kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan Kebonsari; dan
  - c. penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan oleh setiap Blok berbasis sub DAS.
- (8) Penetapan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
  - a. penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter, meliputi:
    - 1. sub BWP I Blok I-B, Blok I-C, Blok I-E, Blok I-G, dan Blok I-I;
    - 2. sub BWP II Blok II-C;
    - 3. sub BWP III Blok III-B, Blok III-C; dan
    - 4. sub BWP IV Blok IV-C.
  - b. pengelolaan sampah di BWP Malang Tenggara meliputi pengelolaan sampah (bank sampah) pada sub zona rumah kepadatan tinggi.
  - c. peningkatan manajemen sistem pengangkutan sampah;
  - d. melakukan pemisahan jenis sampah (sampah);
  - e. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan;
  - f. pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep reduce, recycle, dan reuse; dan
  - g. penetapan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana meliputi:
    - 1. Penetapan jalur evakuasi bencana untuk jalur mobil pemadam kebakaran; dan
    - 2. Penetapan tempat evakuasi bencana untuk menampung korban bencana.

#### Paragraf Keempat

Program Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya

#### Pasal 51

- (1) Perwujudan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dalam Pasal 48 huruf c meliputi sub BWP I dengan fungsi perumahan, perdagangan dan jasa dan pendidikan.
- (2) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tema penanganannya adalah penataan perdagangan dan jasa
  - b. kebutuhan penanganan sub BWP I meliputi:
    - 1. penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL koridor Jalan Kolonel Sugiono;

2. penataan intensitas bangunan pada perumahan padat di Jalan Kolonel Sugiono;
3. penyediaan RTH koridor jalan;
4. pengaturan sistem parkir; dan
5. penataan sistem drainase.

Bagian Kedua  
Prioritas Tahapan Pembangunan

Paragraf Kesatu  
Prioritas Program

Pasal 52

Prioritas program di BWP Malang Tenggara meliputi:

- a. penyusunan RTBL di Sub BWP I;
- b. penetapan zona perlindungan setempat yaitu sempadan sungai, sempadan SUTT dan sempadan kereta api;
- c. penyediaan RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau dan taman median jalan;
- d. mempertahankan dan melestarikan cagar budaya yang terdapat di BWP Malang Tenggara;
- e. perbaikan kualitas lingkungan pada rumah kepadatan tinggi dan pengembangan rumah kepadatan sedang dan rendah;
- f. pengembangan perdagangan dan jasa tunggal berupa pusat perbelanjaan;
- g. pengembangan kawasan industri di BWP Malang Tenggara;
- h. pengembangan fasilitas umum;
- i. pengembangan jaringan jalan;
- j. pengembangan angkutan umum berupa pengembangan bus pepadu moda, bus kota (utara-selatan); dan
- k. penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi.

Paragraf Kedua  
Indikasi Program dan Pentahapan Pembangunan

Pasal 53

- (1) Indikasi program dan pentahapan pembangunan meliputi:
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. sumber pendanaan; dan
  - e. instansi pelaksanaan.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah

Pasal 54

- (1) Optimalisasi aset pemerintah daerah meliputi:
  - a. penggunaan untuk ruang terbuka hijau;
  - b. cadangan untuk pengembangan sarana pelayanan umum; dan
  - c. bagian dari bank tanah.
- (2) Dalam optimalisasi aset pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI  
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 55

- (1) Alat pengendali pemanfaatan ruang adalah peraturan Zonasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengaturan atas:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang; dan
  - b. ketentuan teknis zonasi.

Pasal 56

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. fungsi lindung;
  - b. perumahan dan hunian;
  - c. perdagangan dan Jasa;
  - d. perkantoran;
  - e. industri;
  - f. pendidikan;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan;
  - i. olahraga;
  - j. sosial budaya;
  - k. keagamaan; dan/atau
  - l. fungsi khusus;
  - m. kombinasi/campuran atas dua atau lebih klasifikasi.
- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran XIX dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Zonasi Sub BWP

Paragraf Kesatu  
Sub BWPI

Pasal 57

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWPI BWP Malang Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
- b. sub zona RTH hutan kota dan taman kota (RTH-1) ditetapkan pada I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
- c. sub zona RTH jalur hijau dan median jalan (RTH-2) ditetapkan pada I-A, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
- d. sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-G;
- e. sub zona cagar budaya (SC-2) ditetapkan pada Blok I-A dan Blok I-F;
- f. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-H;
- g. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
- h. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G dan Blok I-H;
- i. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
- j. sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
- k. sub zona aneka industri (I-4) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-G;
- l. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
- m. sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) ditetapkan pada Blok I-F;
- n. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-G;
- o. sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok I-D, Blok I-E, dan Blok I-H;
- p. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok I-E;
- q. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-G;
- r. sub zona peruntukan khusus tandon/reservoir (KH-4) ditetapkan pada Blok I-B;
- s. sub zona peruntukan khusus gardu induk (KH-5) ditetapkan pada Blok I-B;
- t. sub zona peruntukan khusus depo BBM (KH-6) ditetapkan pada Blok I-F;
- u. sub zona peruntukan khusus rumah pemotongan hewan (KH-7) ditetapkan pada Blok I-F;
- v. sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;

- w. sub zona ruang manfaat jalur kereta api (RMJ-KA) ditetapkan pada Blok I-D, Blok I-F dan Blok I-G; dan
- x. sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
- y. sub zona peruntukan campuran meliputi perkantoran dan perdagangan dan jasa (C-3) ditetapkan pada Blok I-F;
- z. sub zona peruntukan campuran perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum (C-4) ditetapkan pada Blok I-C dan Blok I-H;

Paragraf Kedua  
Sub BWP II

Pasal 58

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP II BWP Malang Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F dan Blok II-G;
- b. sub zona RTH hutan kota dan taman kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F dan Blok II-G;
- c. sub zona RTH jalur hijau dan median jalan (RTH-2) ditetapkan pada Blok II-C dan Blok II-F ;
- d. sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-D, Blok II-F dan Blok II-G;
- e. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada Blok II-B, Blok II-C, Blok II-E, dan Blok II-G;
- f. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, dan Blok II-G;
- g. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F, dan Blok II-G;
- h. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F, dan Blok II-G;
- i. sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F, dan Blok II-G;
- j. sub zona aneka industri (I-4) ditetapkan pada Blok II-A; II-D, dan Blok II-G;
- k. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F, dan Blok II-G;
- l. sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) ditetapkan pada Blok II-D;
- m. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok II-G;
- n. sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok II-F; dan
- o. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, dan Blok II-G;
- p. sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, dan Blok II-G;
- q. sub zona ruang manfaat jalur kereta api (RMJ-KA) ditetapkan pada Blok II-G; dan
- r. sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, dan Blok II-G.

Paragraf Ketiga  
Sub BWP III

Pasal 59

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP III BWP Malang Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-D;
- b. sub zona RTH hutan kota dan taman kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok III-A, dan Blok III-B;
- c. sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan (RTH-2) ditetapkan pada Blok III-A;
- d. sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-C, dan Blok III-D;
- e. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-D;
- f. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-D;
- g. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;
- h. sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-D;
- i. sub zona aneka industri (I-4) ditetapkan pada Blok III-B;
- j. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-C, dan Blok III-D;
- k. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok III-A;
- l. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok III-B;
- s. sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III B, Blok III-C, dan Blok III-D; dan
- t. sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-D.

Paragraf Keempat  
Sub BWP IV

Pasal 60

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP IV BWP Malang Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok IV-C;
- b. sub zona RTH hutan kota dan taman kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, dan Blok IV-C;
- c. sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) ditetapkan pada Blok IV-B;
- d. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, dan Blok IV-C;
- e. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok IV-C;
- f. sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok IV-C;

- g. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok IV-B;
- h. sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, dan Blok IV-C; dan
- i. sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, dan Blok IV-C.

Bagian Ketiga  
Penggambaran Zonasi Sub BWP

Pasal 61

- (1) Zonasi Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 digambarkan dalam skala 1:5.000 berdasarkan indeks Rupabumi Indonesia;
- (2) Peta zonasi pada ayat (1) terbagi atas 13 (tiga belas) lembar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam rangka mendukung akurasi perijinan pemanfaatan ruang, maka harus dilakukan pengecekan pada dokumen peta zonasi dengan ekstensi .pdf;
- (4) Dalam hal terdapat persil dengan dua atau lebih kode zonasi, maka peruntukan sub zonanya mengikuti kode zonasi utama, dengan memperhatikan orientasi jalan dan wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan;
- (5) Dalam hal pemanfaatan ruang harus dilakukan pengukuran di lapangan untuk mengetahui situasi obyek di lapangan dengan ukuran lebih kecil daripada 2,5 meter;
- (6) Hasil pengukuran obyek di lapangan dituangkan dalam keterangan rencana kota dan/atau rencana tapak.

Bagian Keempat  
Ketentuan Teknis Zonasi

Pasal 62

- (1) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. Ketentuan tata bangunan;
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
  - e. Ketentuan pelaksanaan.
  - f. Ketentuan tambahan;
  - g. Ketentuan khusus;
  - h. Standar teknis; dan
  - i. Ketentuan pengaturan zonasi.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, serta kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.

- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi KDB Maksimum, KLB Maksimum, Ketinggian Bangunan Maksimum, KDH Minimal, KTB, kepadatan bangunan atau unit maksimum;
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, yang meliputi GSB minimal, tinggi bangunan maksimum, jarak bebas minimal antar bangunan, dan tampilan bangunan;
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur penyediaan prasarana dan sarana minimal yang berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat; dan
  - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ merupakan pemanfaatan ruang yang izinnya yang diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau PZ, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (7) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditentukan.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (9) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan / standar / ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan; dan
- (10) Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan PZ dasar.

### Pasal 63

Ketentuan rinci atas intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 64

Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdapat pada lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 65

- (1) Perizinan Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - a. Izin Prinsip (IP);
  - b. Izin Lokasi (IL);
  - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Izin Lain.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh Walikota kepada calon pengguna ruang, baik orang pribadi maupun badan, yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan PZ.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan pemanfaatannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan jangka waktu berlakunya Izin Pemanfaatan Ruang.
- (4) Perizinan Pemanfaatan Ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 66

- (1) Kawasan pengendalian ketat skala regional yang terdapat di BWP Malang Tenggara meliputi:
  - a. kawasan perdagangan regional di Pasar Gadang;
  - b. wilayah aliran sungai Brantas dan Bango, sumber air dan stren kali dengan sempadannya;
  - c. kawasan jaringan jalan dengan kewenangan nasional dan provinsi, jaringan jalan dengan fungsi kolektor primer, serta jaringan jalan strategis provinsi dan nasional;
  - d. kawasan rawan bencana; dan
  - e. kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria kawasan pengendalian ketat
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang pada pada kawasan pengendalian ketat skala regional harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Gubernur.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum pelaksanaan izin lingkungan dan pembangunan fisik.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dasar dalam pemberian izin prinsip, izin lokasi di kabupaten/kota, dan izin teknis lainnya yang disyaratkan.

BAB XIII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 67

- (1) Insentif Penataan Ruang merupakan perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan oleh Pemerintah Kota Malang kepada:
  - a. pemerintah kota dan/atau pemerintah kabupaten lainnya
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. penanam modal.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - b. pemberian bantuan modal;
- (6) Pemberian insentif penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sub Zona Cagar Budaya diberikan apabila Walikota telah menerbitkan Surat Keterangan Status Cagar Budaya;
- (7) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. pengajuan pemberian kompensasi sebagai daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat;
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. persyaratan khusus bagi perizinan kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh daerah penerima manfaat kepada calon pengguna ruang yang berasal dari daerah pemberi manfaat.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. kewajiban member kompensasi;
  - b. persyaratan khusus bagi perizinan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (9) Pemberian insentif dan disinsentif penataan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

#### Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. memiliki izin pemanfaatan ruang dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan tata bangunan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan prasarana dan sarana minimal dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan pelaksanaan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- h. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan tambahan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- i. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan khusus dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- j. mengikuti dan/atau memenuhi standar teknis dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- k. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan pengaturan zonasi dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- l. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 70

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang telah ditetapkan; dan

- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 71

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

### BAB XV KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

#### Pasal 72

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang daerah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Keanggotaan BKPRD meliputi:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) BKPRD memiliki kelengkapan Sekretariat BKPRD dan kelompok kerja yaitu kelompok kerja perencanaan dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (5) BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembiayaan BKPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Bagian Kedua Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Pembangunan Perkotaan

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal penataan ruang kawasan perkotaan dan pembangunan perkotaan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah administratif dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah.
- (2) Penataan ruang kawasan perkotaan dan pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 74

Dalam proses penataan ruang Daerah, pemerintah dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 75

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan PZ.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan penyelenggaraan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi Administrasi;
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. Denda administratif.
- (5) Penjabaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 76

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen - dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
- a. memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri;
  - b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri;
  - c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan;
  - d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya ; dan
  - e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri;
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 77

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua rencana rinci di bawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 79

- (1) RDTR BWP Malang Tenggara berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR BWP Malang Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### Pasal 80

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

### Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

### Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang,  
pada tanggal : 1 Agustus 2016  
WALIKOTAMALANG,

ttd

MOCH. ANTON

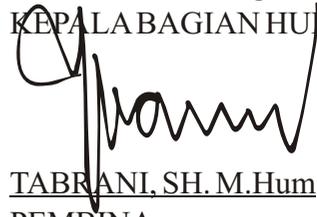
Diundangkan di Malang  
pada tanggal : 28 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

IDRUS

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 165 - 3 / 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH. M. Hum

PEMBINA

NIP. 19650302 19903 1 019

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MALANG TENGGARA  
TAHUN 2016 - 2036**

**I. UMUM**

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
- c. Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang dan indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana;
- f. Peraturan zonasi;
- g. Perijinan;
- h. Insentif dan disinsentif;
- i. Sanksi; dan
- j. Hak, kewajiban dan peran masyarakat

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang;

- Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Yang dimaksud dengan pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Tatacara pelaksanaan heregistrasi ulang cagar budaya, penetapan status benda cagar budaya, perlindungan cagar budaya yang ada, pengembangan cagar budaya yang ada; dan pemanfaatan cagar budaya sebagai daya tarik wisata budaya, serta mekanisme pemberian insentif mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.

Sentra PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swastayang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

Bidang usaha antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan barang antik

Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan permukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan permukiman baru adalah skala permukiman memiliki kriteria jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;

Berdasarkan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya diketahui :

- Taman Kanak-Kanak, jumlah penduduk pendukung 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jiwa dengan luas lahan 500 (lima ratus) meter persegi.
- Sekolah Dasar, jumlah penduduk pendukung 1.600 (seribu enam ratus) jiwa dengan luas lahan 2.000 (dua ribu) meter persegi.

Ayat (3)

Berdasarkan Standar Peraturan Menteri No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya diketahui :

- Praktek Dokter Bersama, jumlah penduduk pendukung 5.000 (lima ribu) jiwa dengan luas lahan 300 (tiga ratus) meter persegi.
- Rawat Inap, jumlah penduduk pendukung 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa dengan luas lahan 300 (tiga ratus) meter persegi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Berdasarkan Standar Peraturan Menteri No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya diketahui :

- Masjid, jumlah penduduk pendukung 5.000 (lima ribu) jiwa dengan luas lahan 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi.
- Musholla, jumlah penduduk pendukung 500 (lima ratus) jiwa dengan luas lahan 1.000 (seribu) meter persegi.

Ayat (7)

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Ayat (1)

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan sekunder.

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jalan arteri merupakan jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan arteri sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Jaringan jalan arteri sekunder-I menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder-I. Jaringan jalan arteri sekunder-II menghubungkan antar kawasan sekunder-I.

Jaringan jalan arteri sekunder-III menghubungkan antara kawasan sekunder-I dan kawasan sekunder-II.

Ayat (5)

Jalan kolektor sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jaringan jalan kolektor sekunder-I menghubungkan antar kawasan sekunder-II.

Jaringan jalan kolektor sekunder-II menghubungkan antara kawasan sekunder-II dengan kawasan sekunder-III.

Ayat (6)

Jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh

penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

Selain meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya, rumaja juga diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar (hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki), lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Ruang Milik Jalan (Rumija) terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Ayat (9)

Persyaratan teknis kelengkapan jalan adalah persyaratan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

Yang dimaksud dengan "perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

Ayat (10)

Cukup jelas

## **Pasal 32**

Cukup jelas

## **Pasal 33**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki guna meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki.
- Jalur sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.

Ayat (2)

Rencana pengembangan pedestrian merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar, dan trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya di antara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### **Pasal 34**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Angkutan umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukan bagi masyarakat umum.
- Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
- Parkir on street adalah parkir yang memanfaatkan badan jalan yang hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu a yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas/atau marka jalan, dan paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kota dan tidak diperkenankan parkir pada jalan nasional dan provinsi.
- Parkir off street adalah parkir di luar badan jalan dan/atau di gedung ataupun tempat parkir khusus.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 35**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Yang dimaksud dengan sub unit terminal merupakan pangkalan angkutan kota dan perbatasan untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang yang umumnya terletak di daerah pasar atau persimpangan yang potensial akan transfer penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 36**

Ayat (1)

Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tenggara (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 37**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Base Transfer Station (BTS) adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan :  
- Drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai.  
- Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tertier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tertier.  
- Drainase tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atapmaupun jalan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

**Pasal 40**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan sistem perpipaan/sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Yang dimaksud dengan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah kawasan perumahan dengan satu kesatuan fisik

(teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah dengan skala yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja.

Yang dimaksud dengan sistem setempat adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang berada didalam persil atau batas tanah dimiliki.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pemantauan dilakukan dengan memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota, bertujuan untuk:

1. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
2. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup, salah satunya dengan pelaksanaan uji laboratorium limbah yang menuju ke sungai secara berkala.
3. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

#### **Pasal 41**

Cukup jelas

#### **Pasal 42**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Multi Purpose Deep Tunnel System (MPDT) merupakan pengembangan infrastruktur yang mengintegrasikan bangunan pengendali banjir, jaringan jalan, instalasi pengolahan limbah, dan utilitas umum lainnya. Infrastruktur ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan kompleksitas permasalahan perkotaan seperti banjir, kemacetan lalu lintas, pengolahan limbah cair perkotaan, dan kelangkaan air bersih.

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Cukup jelas

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Cukup jelas

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengukuran meliputi saluran, bendang, jalan lingkungan, dan jaringan lainnya

**Pasal 62**

Ayat (6)

Cukup jelas

(Ayat 1)

Cukup jelas

(Ayat 2)

Cukup jelas

(Ayat 3)

Yang dimaksud dengan intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kotasesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

Yang dimaksud dengan koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Yang dimaksud dengan tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setenggara ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

Yang dimaksud dengan Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Yang dimaksud dengan Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

(Ayat 4)

Yang dimaksud dengan Garis Sempadan adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui.

Yang dimaksud dengan Garis sempadan jalan, yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas pekarangan terdepan. GSJ merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan.

Yang dimaksud dengan Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).

Yang dimaksud dengan jarak bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

Tampilan bangunan adalah wujud bangunan gedung yang ditetapkan dengan pertimbangan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

(Ayat 5)

Cukup jelas

(Ayat 6)

Cukup jelas

(Ayat 7)

Cukup jelas

(Ayat 8)

Cukup jelas

(Ayat 9)

Cukup jelas

(Ayat 10)

Cukup jelas

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

**Pasal 67**

(Ayat 1)

Cukup jelas

(Ayat 2)

Cukup jelas

(Ayat 3)

Cukup jelas

(Ayat 4)

Cukup jelas

(Ayat 5)

Insentif lainnya yang bersifat insentif non fiskal dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi atau promosi.

(Ayat 6)  
Cukup jelas  
(Ayat 7)  
Cukup jelas  
(Ayat 8)  
Cukup jelas  
(Ayat 9)  
Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Cukup jelas

**Pasal 70**

Cukup jelas

**Pasal 71**

Cukup jelas

**Pasal 72**

Cukup jelas

**Pasal 73**

Cukup jelas

**Pasal 74**

Cukup jelas

**Pasal 75**

Cukup jelas

**Pasal 76**

Cukup jelas

**Pasal 77**

Cukup jelas

**Pasal 78**

Cukup jelas

**Pasal 79**

Cukup jelas

**Pasal 80**

Cukup jelas

**Pasal 81**

Cukup jelas

**Pasal 82**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 26